

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai dalam demokrasi. Keberlangsungan Pemilu pun menjadi indikator utama dari eksistensi sebuah negara yang menganut sistem politik demokrasi (Isra & Fahmi, 2019: 11). Sebagai contoh Indonesia, menempatkan pemilu sebagai wadah dalam memunculkan kepemimpinan baru dalam politik. Gagasan tentang pemilu di Indonesia berpijak secara tersirat pada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) paragraf keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” (Huda & Nasef, 2017: 42). Bersamaan dengan itu, ihwal mengenai hak warga negara dalam pemilu termaktub secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pada pelaksanaannya, pemilu menempuh jalan panjang sebelum menemukan formulasi seperti sekarang. Dibuktikan dengan konstelasi pelaksanaan dalam setiap masa pemerintahan di Indonesia yang menjadi sebuah tantangan. Dimulai dari kesuksesan pemilu terbesar menurut Herber Feith dan peneliti luar negeri lain, terjadi pada pelaksanaan pemilu pertama pada tahun 1955 (Isra & Fahmi, 2019: 39). Hasil pemilu ini berhasil melegitimasi eksistensi Indonesia sebagai negara dengan sistem

politik demokratis. Sukses besar ini awalnya diluar dugaan mengingat Indonesia baru pertama melaksanakan Pemilu secara langsung. Bertolak belakang dengan itu, penyimpangan muruah pemilu justru terjadi di masa orde baru. Pemilu terlaksana dengan orientasi sistem yang sangat otoriter pada prosesnya. Mulai dari regulasi sampai pelaksanaan merupakan sebuah desain yang dicanangkan demi melanggengkan kekuasaan Presiden Soeharto pada saat itu.

Penataan keberlangsungan pemilu secara substansial baru terlaksana pada era reformasi (Bawaslu, 2015: 1) . Penataan ini dimaksudkan untuk merumuskan sistem kepemiluan di Indonesia ke arah yang lebih demokratis dan partisipatif dengan meninggalkan bayangan orde baru. Berdasarkan TAP MPR No. XIV/MPR/1998 yang mengatur tentang transisi pemerintahan orde baru ke reformasi, salah satunya berisi mengenai penambahan asas demokratis, jujur, dan adil, sebagai penyempurnaan terhadap asas sebelumnya yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia. Selain itu, kewenangan terhadap penyelenggara pemilu diberikan kepada suatu badan yang memegang prinsip bebas dan mandiri. Badan ini diisi oleh unsur partai politik dan pemerintah, serta diawasi oleh suatu badan yang mandiri pula. Lembaga independen ini kemudian diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 16 tahun 1999.

Setiap penyelenggara pemilu pada tataran pusat maupun daerah memiliki pedoman konstitusi untuk mencapai tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi sesuai dengan PKPU No. 18 tahun 2018. Implikasi dari baiknya proses sosialisasi ini tentu pada akhirnya bermuara pada keberhasilan dalam menghadirkan pemilu yang demokratis pula. Menurut *The United Nations Democracy Fund (UNDEF)*, *Open*

Society Foundation, dan TIRI Pemilu yang demokratis harus mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Integritas.** Prinsip ini merupakan elemen penting yang didasari dengan semangat kejujuran dan akuntabilitas yang menjadi roh dalam keseluruhan pemilu.
2. **Partisipasi.** Prinsip yang menjelaskan bahwa suara rakyat harus didengarkan, dihargai, dan diwakili dengan baik. Terlebih dalam sistem demokrasi perwakilan, partisipasi negara merupakan kunci keberhasilan keterwakilan demokrasi.
3. **Penegakan hukum.** Penegakan hukum harus tegas dalam rangka mengukuhkan legitimasi proses demokrasi perwakilan.
4. **Imparsial.** Setiap pemilih dan calon-calon wakil rakyat dijamin keadilannya di mata hukum.
5. **Profesionalisme.** Pengetahuan teknis penyelenggaraan pemilu yang mumpuni dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan proses tersebut.
6. **Independensi.** Pihak penyelenggara dan yang memiliki kewenangan harus menegakkan prinsip independen. Prinsip ini juga harus dijamin dan dihargai dalam hukum.
7. **Transparansi.** Elemen utama yang berkaitan dengan keterbukaan akses informasi yang berkaitan dengan pemilu.
8. **Timeslines.** Konsisten dan perencanaan menjadi bagian penting dari sebuah pemilu.
9. **Tanpa Kekerasan.** Setiap proses dari pemilu harus terbebas dari unsur intimidasi, kekerasan, tindak koersif, korupsi, dan tindakan yang bertujuan melanggar aturan mengenai kepemiluan.

10. **Regularity.** Pemilu harus dilaksanakan secara periodik.

11. **Penerimaan.** Keputusan terhadap hasil pemilu harus diterima dengan lapang (Isra & Fahmi, 2019: 23–24).

Meninjau dari aktualisasi terhadap prinsip-prinsip pemilu diatas, menjadi menarik untuk dilihat pada setiap penyelenggaraannya. Salah satu penyelenggaraan pemilu yang menurut peneliti layak menjadi sorotan adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. KPU sempat menunda pelaksanaan pilkada dengan mempertimbangkan penyebaran wabah *Corona Virus Diseases* (Covid-19). Penundaan ini mengacu pada pasal 120 A ayat 1 tentang penundaan penyelenggaraan pemilu ditengah ancaman kebencanaan, kerusuhan, gangguan kemanan, dan lainnya sampai dengan bulan Desember. Beberapa diantara penundaan ini ditujukan sebagai pengejawantahan terhadap ketakutan dalam menghadirkan pemilu yang demokratis dan tidak terlaksananya prinsip-prinsip paling fundamental di dalam pemilu. Pertimbangan lain juga berkaitan dengan langkah-langkah sosialisasi yang selama ini banyak bertumpu pada cara-cara konvensional dalam meningkatkan kesadaran pemilih.

(dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/22/06253311/kpu-resmi-terbitkan-sk-penundaan-tahapan-pilkada-ini-rinciannya>, pada 22 Januari 2021, pukul 16:00 WIB).

Pelaksanaan pemilu pun terlaksana pada tanggal 09 Desember 2020 dengan menanggung risiko bertambahnya kluster penyebaran *covid-19*. Ditengah kritik yang banyak bermunculan, KPU ternyata berhasil melampaui target partisipasi pada Pilkada 2015 sebelumnya dengan capaian 76,09%. Dalih minimnya partisipasi masyarakat menjadi terbantahkan atas capaian ini. Meskipun tidak melampaui capaian target secara nasional, namun keberhasilan pilkada ini menuai pujian dari berbagai pihak. Salah satunya adalah duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia yang diwakilkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dia menyebutkan bahwa capaian *voters turn out* dari penyelenggaraan pemilu cukup luar biasa dan belum bisa ditandingi oleh Amerika Serikat sekalipun.

Kamis 21 Januari 2021, 19:00 WIB

Amerika Puji Pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia

MediaIndonesia.com | Internasional



Dok. Kemendagri

Mendagri Tito Karnavian (kiri) saat menerima Dubes Amerika Serikat untuk Republik Indonesia Sung Y Kim.

Gambar 1.1

Pujian Duta Besar Amerika terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Indonesia

(Dikutip dari: <https://mediaindonesia.com/internasional/378963/amerika-puji-pelaksanaan-pilkada-serentak-di-indonesia>, pada tanggal 25 Januari 2021, pukul 13:00 WIB)

Kesuksesan pilkada ini juga diikuti oleh capaian pilkada di berbagai provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan 3 pemilihan di Kabupaten dengan agenda pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul. Pada pelaksanaan rapat koordinasi refleksi dan proyeksi pelaksanaan Pilkada 2020, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta didampingi ketua KPU DIY menyampaikan laporan terkait pencapaian tingkat partisipasi Pilkada di DIY dengan jumlah presentase 79,17%. Capaian ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah partisipasi pemilih di Pilkada dibandingkan dengan Pilkada 2015, sekaligus melampaui target nasional. Sinergitas yang dilakukan oleh berbagai pihak disebut terbukti menghadirkan tumbuh kembang demokrasi yang terselenggara di Provinsi DIY. Selain itu, perbaikan data pemilih dan strategi sosialisasi yang diamanatkan pada setiap KPU di tataran Kabupaten/Kota berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

(Dikutip dari: <https://jogjaprov.go.id/berita/detail/9067-pilkada-2020-sukses-digelar-model- pesta-demokrasi-masa-depan>, pada tanggal 25 Januari 2021, pukul 13:40 WIB).

KPU Kabupaten Bantul merupakan penyelenggara pilkada dengan tingkat partisipasi terbanyak di DIY. KPU DIY memberikan penghargaan sebagai apresiasi atas pencapaian tersebut. Penghargaan ini berkategori “penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan tingkat partisipasi masyarakat tertinggi dalam pemilihan serentak tahun 2020”. Pencapaian ini juga melampaui target nasional dan target dari KPU DIY dengan perolehan 81,39%. Hasil tersebut mengalahkan dua penyelenggara lainnya di DIY. KPU Kabupaten Gunung Kidul memperoleh 80,82%, sedangkan KPU Sleman bahkan tidak berhasil mencapai target partisipasi nasional dan DIY dengan hanya memperoleh 76,27%. Berikut merupakan tabel tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten/ Kota di DIY.

Tabel 1.1

Daftar Hasil Partisipasi Pemilih di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020

No.	Kabupaten/ Kota	Presentase Partisipasi Pemilih Pilkada DIY 2020
1.	Kabupaten Bantul	81,3% = 567.557 Pemilih
2.	Kabupaten Gunung Kidul	80,82 = 481.952 Pemilih
3.	Kabupaten Sleman	76% = 604.613 Pemilih

Sumber: Diolah dari beberapa media online Tirto.id, Detik.com, Humas DIY dan Penetapan Hasil Rekapitulasi dari KPU Sleman dan Gunung Kidul, pada tanggal 25

Januari 2020, pukul 14:35 WIB



Gambar 1.2

Piagam Penghargaan oleh KPU DIY kepada KPU Kabupaten Bantul sebagai Penyelenggara dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat Tertinggi dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020

Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Bantul, diambil pada 20 April 2021

Tingginya tingkat partisipasi di Kabupaten Bantul ini disebut oleh Ketua KPU Kabupaten Bantul Didik Joko Nugroho tidak terlepas dari sosialisasi yang massif dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul sebelumnya. Ditengah penyebaran virus *covid-19*, KPU banyak melakukan transformasi dengan mengedepankan pendekatan-pendekatan baru dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Bantul. Terobosan-terobosan yang dilakukan mencakupi beberapa hal seperti pembentukan

forum-forum komunikasi tingkat Rukun Tetangga (RT) yang lebih bertumpu secara virtual, meskipun tetap melakukan pertemuan langsung dengan pembatasan warga, penetrasi informasi melalui media-media sosial dengan menyajikan informasi dan edukasi terhadap pemilih, dan jejaring Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kontribusi lain juga mencakup pada akurasi data pemilih dan meningkatkannya kepedulian masyarakat Bantul terhadap perbaikan kondisi Bantul ke arah yang lebih baik.

(Dikutip dari <https://jogja.antaranews.com/berita/466232/kpu-sebut-tingginya-partisipasi-pilkada-bantul-faktor-sosialisasi-yang-masif>, pada tanggal 25 Januari 2021, pukul 15:04 WIB)

Keberhasilan Kabupaten Bantul ini menjadi pemantik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan studi strategi komunikasi politik. Dengan pedoman strategi sosialisasi yang sama secara nasional, namun berbeda dengan implemtasinya di lapangan. Dibuktikan dengan capaian KPU Kabupaten Bantul yang berhasil meraup tingkat partisipasi Pilkada tertinggi di DIY. Keberhasilan ini menurut peneliti tidak terlepas dari peran strategi komunikasi politik melalui strategi sosialisasi dan informasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Peneliti menggunakan studi kasus instrisik, mengingat fenomena ini termasuk unik dan menarik untuk diteliti, dikarenakan luaran yang berbeda dari hasil partisipasi masyarakat yang dicapai oleh setiap penyelenggara pemilu. Fokus penelitian yang akan diteliti adalah strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Bantul dalam rangka memaksimalkan langkah strategis terkait sosialisasi tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten

Bantul kepada masyarakat Bantul dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam studi akademik komunikasi politik terkhusus pada penyelenggara pemilu yang masih sangat minim saat ini. Secara mendalam, penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori empat pilar dalam strategi komunikasi politik yaitu merawat ketokohan, memantapkan lembaga, menciptakan kebersamaan, dan membangun konsensus.

Penelitian ini juga mempertimbangkan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi aspek pendukung dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama berjudul ‘Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019’ yang dilakukan oleh Choirullah, Rahmatunnisa, dkk (2020), Vol (3), No (2). Penelitian ini menemukan bahwa dalam meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Kota Bekasi menggunakan strategi ofensif sebagai upaya untuk melakukan sosialisasi secara massif dan merata ke daerah-daerah. Strategi ini terdiri menjadi dua bagian yaitu memperluas dan menembus pasar. Contoh strategi yang dilakukan KPU ini yaitu relawan demokrasi dengan sasaran basis pemilih, pemberdayaan divisi sosialisasi dan partisipasi pada tingkat penyelenggara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta peranan sosial media dalam penetrasi informasi kepada pemilih (Pulungan et al., 2020).

Penelitian kedua berjudul ‘Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat’ yang dilakukan oleh Zainab dan Salisah (2019), Vol (9), No (1). Penelitian ini menemukan

bahwa KPU Kabupaten Bangkalan melakukan strategi atau upaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan cara-cara sebagai berikut: **Pertama**, melakukan strategi sosialisasi politik dengan menggunakan metode tatap muka (*face to face*) seperti melakukan kegiatan yang menyoroti tokoh pemuda, masyarakat, mahasiswa, dan perempuan. **Kedua**, strategi pendidikan pemilih kepada basis pemula sebagai contoh pelajar yang duduk di bangku SMA. **Ketiga**, strategi penguatan kelembagaan dengan cara meningkatkan kapasitas dan kualitas pada tataran penyelenggara seperti PPK, PPS, dan KPPS. Hal ini juga didorong melalui peningkatan terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi kepada publik (Zaenab & Hadiati Salisah, 2020).

Penelitian Ketiga berjudul '*The General Election Commission Role of Political Communication in Preventing Absent Voters in Sragen Regency*' yang dilakukan oleh Sutopo dan Prajoko (2018) Vol (241). Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada di Kabupaten Sragen diakibatkan oleh dua faktor yaitu penerapan *Elaboration Like Hood* (ELM) dan psikologi politik. Hal itu terlihat dari kurangnya program sosialisasi melalui penyebaran informasi kepada pemilih. Komunikasi persuasif yang tidak merata seperti informasi yang tidak menjangkau setiap tingkat kecamatan, sehingga mempengaruhi sikap masyarakat yang cenderung absen dalam pemilihan tersebut (Sutopo, D. & Prajoko, 2018).

Penelitian Keempat berjudul '*Competing Not Complementing: KPU, Bawaslu, and the Dynamic of Election Monitoring in Pemilu 2019*' yang dilakukan oleh Febriansyah, Takiyuddin, dkk (2020). Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pemantauan Pemilu yang dilakukan oleh Mata Massa (Matamassa.org) dan Kawal Pemilu melalui pemanfaatan teknologi berbentuk aplikasi dan web yang berdampak

positif dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap Pemilu. Keikutsertaan masyarakat ini berbentuk penghitungan cepat yang dilakukan oleh sukarelawan dan pelaporan terhadap kecurangan yang terjadi pada pemilu di Indonesia. Eksistensi lembaga pengawasan bentukan publik ini berhasil melampaui waktu rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU sendiri. Hal ini juga membuktikan peranannya lebih efektif dibandingkan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) (Febriansyah et al., 2020).

Penelitian Kelima berjudul '*Symbolic Political Communication, and Trust: A Young Voters' Perspective of the Indonesian Presidential Election*' yang dilakukan oleh Susila Dean, dkk (2019). Penelitian ini menemukan bahwa adanya hubungan yang koheren antara kecerdasan afektif dan referensi budaya pemilih pemula. Hal ini menunjukkan adanya faktor selain pendidikan dan pengalaman politik kandidat yang mempengaruhi kepercayaan pemilih pemula terhadap kandidat Presiden pada pemilu 2019. *Branding* politik yang dilakukan oleh Jokowi dan Prabowo menunjukkan adanya upaya dalam menciptakan citra di mata pemilih (Susila et al., 2020).

Penelitian Keenam berjudul '*Strategi Komunikasi Politik Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 2014-2019 sebagai Humas Pemerintah*' yang dilakukan oleh Silvanus Alvin (2020), Vol (14), No (1). Penelitian ini menemukan bahwa strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh juru bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menentukan langkah strategis penyebaran informasi kepada masyarakat yaitu: Pertama, menentukan terkait citra seperti apa yang ditunjukkan kepada publik, sehingga luarannya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kedua, menentukan publik sasaran dalam hal ini merupakan jenis publik isu tunggal yang tertarik terhadap satu topik atau isu yang sedang berkembang. Bentuk program

dari strategi ini berupa manajemen komunikasi mengenai penyebaran informasi kepada pers atau media terkait yang berhubungan dengan wakil Presiden, pelaksanaan konferensi pers dan mewakilkan Wakil Presiden apabila berhalangan hadir, serta penyebaran informasi yang dilakukan di dua media yaitu Twitter dan Instagram (Alvin, 2020).

Penelitian Ketujuh berjudul ‘Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Pemilu sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur’ yang dilakukan oleh Putri (2016), Vol (4), No (1). Penelitian ini menemukan bahwa adanya bentuk-bentuk komunikasi interaksional melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dengan melibatkan pihak-pihak seperti perguruan tinggi, sekolah-sekolah, dan Kesbangpolinmas. Program ini berbentuk tatap muka langsung dan penggunaan media-media interaktif yang memantik adanya dialog antara masyarakat dan KPU terkait dengan pemilu. Beberapa contoh program-program yang dilakukan adalah pertemuan langsung atau sosialisasi kepada masyarakat, live streaming di media-media seperti televisi, radio, dan media-media konvensional seperti koran, brosur, pamflet, dan media cetak lain (Putri, 2015).

Penelitian Kedelapan berjudul ‘Analisis Strategi Komunikasi Politik terhadap Partisipasi Politik Pemenangan Rudi dan Purnomo dalam Pilkada 2015 Kota Surakarta’ yang dilakukan oleh Anna Valiana (2016), Vol (2), No (2). Penelitian menemukan bahwa keberhasilan dari kemenangan pasangan Rudi dan Purnomo tidak terlepas dari langkah strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh tim sukses dari

pasangan ini. Langkah-langkah tersebut yaitu Pertama perencanaan yang meliputi pendanaan, pembentukan tim kampanye, slogan, serta target sasaran. Kedua, pengorganisasi yang meliputi komunikasi politik antar partai pendukung, serta elemen masyarakat. Pendekatan komunikasi politik yang dilakukan berupa terjun langsung ke lapangan dengan melihat dan terlibat langsung dalam aktivitas masyarakat (Analysis et al., 2016).

Penelitian Kesembilan berjudul ‘Strategi Sosialisasi Politik oleh KPU Kabupaten Ngawi untuk Membentuk Pemilih Pemula yang Cerdas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 di Kabupaten Ngawi’ yang dilakukan oleh Dwi Ardiani, Dede Sri Kartini, dkk (2019), Vol (6), No (1). Penelitian ini menemukan bahwa KPU Kabupaten Ngawi melakukan strategi-strategi sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Strategi-strategi tersebut strategi menyerang dengan gencar melaksanakan sosialisasi secara langsung dan strategi bujukan yang dilakukan dengan melibatkan media televisi sebagai media dalam menayangkan debat dan iklan-iklan kampanye KPU. Selain itu strategi penguatan kelembagaan dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas dari penyelenggara Pemilu (Analysis et al., 2016).

Penelitian Kesepuluh berjudul ‘*Marketing of Political Communcation Created by National Mandate Party (PAN) in General Election 2005-2015, North Sumatera Utara, Indonesia*’ yang dilakukan oleh Anang Anas Azhar (2018), Vol (1), No (2). Penelitian ini menunjukkan adanya kecenderungan peralihan dukungan masyarakat terhadap partai politik yang lebih mendepankan aspek pragmatis. Masyarakat tidak lagi terlalu mementingkan ranah ideologis dari sebuah partai, melainkan program kerja

yang ditawarkan oleh partai ataupun politisi. Disamping itu, meningkatnya jumlah kalangan non partisan dari partai menjadi sasaran setiap partai dalam mengambil hati kalangan tersebut (Azhar, 2018).

Penelitian ini akan menawarkan khazanah baru dalam penelitian komunikasi politik mengingat masih minimnya penelitian terkait strategi komunikasi politik yang berfokus terhadap kelembagaan di Indonesia. Situasi pandemi *covid 19* yang menyertai keberlangsungan Pemilu di Indonesia juga menjadi sebuah keunikan untuk dilihat dalam perspektif strategi komunikasi politik lembaga penyelenggara pemilu dalam beradaptasi dengan situasi tersebut. Kritik terhadap minimnya partisipasi yang awalnya bermunculan menjadi terbantahkan mengingat berhasilnya KPU dalam menyelenggarakan pemilu dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Keberhasilan ini pun diikuti oleh KPU Kabupaten Bantul dengan meraih tingkat partisipasi tertinggi di pilkada DIY. Capaian yang tinggi dan diikuti oleh situasi pandemi akan dilihat kaitannya dengan konsep strategi komunikasi politik yang ditawarkan oleh Anwar Arifin.

Berdasarkan kasus diatas, peneliti meyakini perlu adanya kajian tentang strategi komunikasi politik secara mendalam yang dilakukan oleh KPU Bantul pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2020. Penelitian ini juga berdasarkan pada fakta yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul merupakan peringkat pertama dalam tingkat partisipasi pemilih di DIY. Hal ini yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian tentang **“Strategi Komunikasi Politik KPU Kabupaten Bantul dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2020”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan diatas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah khazanah baru mengenai studi komunikasi politik di Indonesia, terkhusus kajian strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak KPU Kabupaten Bantul: diharapkan menjadi pedoman dan evaluasi untuk meninjau kembali efektivitas strategi komunikasi politik yang dibangun pada pemilu yang akan datang.
- b. Bagi masyarakat Bantul: diharapkan penelitian ini berkontribusi untuk menjadikan masyarakat Bantul ikut serta sebagai pengontrol terhadap ketercapaian aktivitas strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pada setiap pelaksanaannya.
- c. Bagi KPU: diharapkan menjadi acuan terhadap penerapan strategi komunikasi politik bagi pihak penyelenggara pemilu pada tataran pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/ Kota.

E. Kajian Teoritis

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan teori-teori yang menjadi dasar atas peninjauan penelitian diatas. Beberapa teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Demokratisasi Pemilu di Indonesia

Pemilu dianggap sebagai lambang dan tolak ukur atas penegakan demokrasi di sebuah negara. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, berserikat akan dianggap berhasil jika mencerminkan tingkat partisipasi dan asiprasi yang tinggi pula. Untuk menjiwai pemilu yang demokratis di Indonesia sendiri secara substansial diatur

pada pasal 22E Ayat 1 UUD NRI 1945 yang mengandung tujuh asas Pemilu yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Isra & Fahmi, 2019: 17). Adapun maksud dari prinsip tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi sebagai berikut:

1. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya.
2. Umum, pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
3. Bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
4. Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
5. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta

semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun (KPU, 2003).

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti akan melihat bagaimana prinsip demokratis dalam pemilu ini dijalankan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2020. Hal ini didasarkan pada temuan peneliti yang menunjukkan adanya tingkat partisipasi yang tinggi di Kabupaten Bantul. Selain itu, peneliti juga akan memfokuskan terhadap langkah strategis yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

2. Komunikasi Politik

A. Pengertian Komunikasi Politik

Menurut Rush dan Althoff (1997) dalam Muhtadi Komunikasi politik adalah transmisi pesan politik relevan yang berasal dari satu bagian sistem politik, ditujukan kepada bagian yang lain, ataupun antara sistem sosial dengan sistem politik. Unsur-unsur yang termasuk didalamnya seperti proses sosialisasi, partisipasi, serta rekrutmen dalam politik tidak terlepas dari peran komunikasi di dalamnya (Muhtadi,

2008: 27–28). Komunikasi memiliki posisi sentral dalam penyampaian pesan-pesan yang dilakukan oleh kekuasaan. Hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakatnya menunjukkan adanya saling kebutuhan informasi satu sama lain.

Perkembangan kajian komunikasi politik sendiri ditandai dengan kajian efek terbatas. Kajian ini memusatkan perhatian pada kajian teori mengenai penetapan agenda, pengutamaan pembingkai, aliran komunikasi dua tahap, dan diskusi politik. Penetapan agenda ini dilakukan untuk mempermudah dalam konstruksi opini publik dalam tahap berikutnya. Argumentasi ini menunjukkan bahwa adanya upaya media massan dalam mempengaruhi sikap dari khalayaknya. Penggunaan kajian media dalam perspektif kajian komunikasi politik berimplikasi besar dalam membawa perubahan (Kaid, 2015: 6–7) .

Menurut Muhtadi unsur-unsur dalam komunikasi politik yaitu sebagai berikut:

a. Komunikator politik

Komunikator politik disebut pihak yang memprakrsai dan mengarahkan suatu tindakan komunikasi. Komunikator politik ini dapat berwujud individu, lembaga, lembaga, ataupun, berupa kumpulan orang. Pihak-pihak ini memainkan fungsi dalam menciptakan opini publik.

b. Khalayak Komunikasi Politik

Khalayak komunikator politik adalah penerima pesan dari komunikator politik. Khalayak ini dapat memberikan respon atau umpan balik yang berbentuk pikiran, sikap, maupun perilaku politik yang diperankannya.

c. Saluran-Saluran Komunikasi Politik

Saluran-saluran ini merupakan setiap pihak ataupun unsur yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik. Saluran-saluran komunikasi ini dapat berupa kelompok-kelompok yang berkepentingan maupun media massa (Muhtadi, 2008: 31–35).

Menurut Anwar Arifin tujuan komunikasi politik dari komunikasi politik yaitu sebagai berikut:

a. Citra Politik

Citra politik ini terbentuk berdasarkan informasi yang diterima, baik secara langsung maupun melalui media politik, termasuk di dalamnya media massa dan sosial yang bekerja menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. Citra ini didapatkan berasal dari efek komunikasi politik yang kemudian dipahami sebagai kesan yang melekat dibenak individu atau kelompok.

b. Opini Publik

Komunikasi politik bertujuan membentuk dan membentuk opini publik untuk mendorong partisipasi politik. Partisipasi politik dimaksudkan agar individu-individu berperan serta dalam kegiatan politik. Bentuk dari partisipasi politik ialah memberikan suaranya kepada politikus dan atau partai politik dalam pemilihan umum.

c. Partisipasi Politik dan Kebijakan Politik

Partisipasi politik pada akhirnya merupakan keikutsertaan dalam proses penetapan kebijakan publik. Partisipasi ini adalah keterlibatan individu-individu

dalam berbagai macam tindakan dalam kehidupan politik. Keikutsertaan itu dapat berupa kegiatan memberi atau tidak memberi dukungan politik dalam berbagai kegiatan, terutama dalam kegiatan kampanye dan pemberian dalam pemilihan umum serta kegiatan dalam proses penetapan kebijakan politik.

d. Pemilihan Umum

Salah satu tujuan komunikasi politik yang paling penting adalah memenangkan pemilu. Kegiatan pemilihan umum berkaitan langsung dengan komunikasi politik adalah kampanye dan pemungutan suara. Kampanye pemilihan umum merupakan usaha-usaha dalam mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti *public relations*, retorika, pemasaran politik, komunikasi massa, retorika, lobi, dan tindakan politik (Arifin, 2011a: 178–220).

B. Komunikasi Politik dalam Pemilu

Salah satu fungsi dari komunikasi politik yaitu menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik masyarakat yang pada akhirnya menjadi input bagi suatu sistem politik. Bersamaan dengan itu menyalurkan kebijakan yang diambil untuk dipahami secara kolektif, sehingga menumbuhkan partisipasi produktif dalam membangun tujuan politik yang sama. Oleh karena itu, tujuan tersebut memerlukan sosialisasi politik. Sosialisasi politik berfungsi dalam menyamapaikan informasi, tentang berbagai agenda politik dari sesuatu kekuatan politik tertentu, melakukan proses internalisasi sesuai dengan cita-cita politik, serta berusaha melakukan transformasi sosial menuju tatanan masyarakat yang lebih kondusif untuk berdemokrasi (Arifin, 2011a: 144).

Proses pemilihan umum (*general election*) misalnya selain merupakan tahapan rekrutmen, juga dapat berfungsi sebagai proses pendidikan politik bagi masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran politik, sekaligus mendorong semakin berkembangnya partisipasi politik secara lebih sehat dengan mengedepankan hal-hal yang konstruktif.

3. Partisipasi Politik

Menurut Budiardjo Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan secara aktif ikut serta dalam kehidupan politik. Kegiatan ini memiliki dampak terhadap secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (Budiardjo, 2008: 367). Kegiatan yang berhubungan dengan partisipasi politik umumnya seperti menghadiri rapat umum, menjadi kader atau anggota partai organisasi yang bergerak di bidang sosial, memberikan hak suara pada pemilu, mengadakan hubungan *lobbying* dengan pejabat pemerintah, dan berbagai kegiatan lain.

Konsep partisipasi politik dalam negara demokrasi memiliki peran yang sangat penting. Berpijak pada pemahaman mengenai kedaulatan rakyat yang dilakukan secara bersama-sama, demi menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat untuk menentukan tampuk kepemimpinan. Eskalasi partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam sebuah negara akan bermuara pada baiknya penerapan demokrasi di wilayah tersebut. Hal ini juga akan mengindikasikan adanya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan kebijakan oleh penguasa.

Mengacu pada pernyataan diatas, peneliti meyakini bahwa tingginya tingkat partisipasi pilkada serentak di Kabupaten Bantul merupakan harapan dari KPU sebagai penyelenggara. Jika meninjau dari penelitian yang akan diambil maka partisipasi yang dimaksud adalah keikutsertaan masyarakat Bantul pada Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Bantul. Hal ini tentu menjadi acuan dari KPU sebagai upaya dalam memetakan dimensi partisipasi politik di Kabupaten Bantul. Dimensi partai politik menurut Subiakto dan Ida mencakup tiga hal yaitu gaya umum partisipasi, motif yang mendasari kegiatan mereka, dan konsekuensi berpartisipasi melihat peran seseorang di dalam politik (Subiakto et al., 2012: 127).

Perkembangan partisipasi politik pun semakin pesat. Dewasa ini, publik dan pemerintah dapat menggunakan sosial media sebagai *platform* untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Beragam ekspresi dan opini bisa ditunjukkan oleh pengguna. Oleh karena, banyaknya contoh-contoh pemanfaatan media sosial seperti kampanye politik, penggalangan dana, dan ‘perang’ opini menunjukkan kebaruan dalam wujud partisipasi politik (Subiakto et al., 2012: 73).

4. Strategi Komunikasi Politik

Menurut Anwar Arifin Komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional mengenai tindakan yang akan dijalankan saat ini, demi mencapai tujuan politik pada masa yang akan datang. Merawat ketokohan, memantapkan kelembagaan politik, menciptakan kebersamaan, dan membangun konsensus merupakan keputusan yang strategis yang tepat bagi komunikator politik (Arifin, 2011a: 35). Keberlangsungan komunikasi politik tidak hanya berfokus kepada pesan politik saja, melainkan juga pengaruh dari siapa tokoh politik, tokoh aktivis,

professional dari sebuah lembaga atau instansi mana yang menyampaikan hal itu. Oleh karena itu, keberhasilan komunikasi politik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan bergantung pada ketokohan komunikator politik.

Secara lebih lanjut Anwar Arifin menyebutkan bahwa sebuah tujuan dari komunikasi politik adalah memenangkan Pemilu. Efektivitas dalam komunikasi politik yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara diukur melalui jumlah suara yang diperoleh melalui pemilu yang bersih, bebas, langsung, dan rahasia (Arifin, 2011a: 219–220). Kegiatan ini bisa berupa kampanye dan pemungutan suara. Kampanye ini merupakan sebuah usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif dan tidak memaksa.

Penjelasan tersebut menjadi dasar peneliti untuk melakukan studi mengenai seluruh strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan politiknya. Penelitian akan mengkaji tentang langkah-langkah yang dilakukan KPU Kabupaten Bantul selaku komunikator politik dalam penyelenggara Pilkada Bantul 2020. Langkah-langkah seperti pemberdayaan sumber daya dalam membuat langkah dalam pengkondisian informasi dan sinergitas antar tiap lembaga demi terwujudnya keinginan dari KPU yang tingkat partisipasi yang tinggi.

Komunikasi politik erat kaitannya dengan pemilihan umum baik kepala daerah, anggota legislatif, maupun Presiden. Efektivitas dari komunikasi politik dapat terlihat dari minimnya angka pemilih yang golput. Keberadaan kelompok yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilu merupakan bentuk kegagalan terhadap sosialisasi dan komunikasi politik (Arifin, 2011b: 225). Penjelasan ini kemudian menjadi pemantik untuk peneliti dalam melihat keberhasilan dari KPU Kabupaten

Bantul dalam meningkatkan partisipasi pemilih ditengah pandemi *covid 19* dan perbandingan dengan penyelenggara lain yaitu KPU Gunung Kidul dan Sleman.

Dimensi-dimensi dalam strategi komunikasi politik yaitu sebagai berikut:

a. Merawat Ketokohan

Ketokohan politik adalah figur maupun kelembagaan yang memiliki kredibilitas, daya tarik, dan kekuasaan. Ketokohan ini memiliki pengaruh terhadap strategi komunikasi politik yang akan dijalankan. Kecendrungan terhadap keputusan pemilih dalam menjatuhkan pilihannya tidak terlepas dari ketokohan yang ditunjukkan oleh aktor politik. Oleh karena itu, merawat ketokohan juga berarti menciptakan kekuatan yang berpengaruh terhadap kelembagaan politik. Peran figur politik dalam sebuah partai sangat menentukan keberhasilan partai tersebut dalam pemilu. Sebagai contoh, figure kuat Megawati dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang banyak memberikan sumbangsih terhadap eksistensi dari politik tersebut sampai sekarang.

b. Memantapkan Kelembagaan

Kemantapan sebuah lembaga politik selalu beriringan dengan ketokohan politik. Melekatnya persepsi ataupun citra masyarakat terhadap lembaga atau aktor politik tidak terlepas dari kesan yang digambarkan oleh lembaga tersebut sebelumnya. Upaya lembaga politik dalam memenuhi kepentingan dari publiknya tentu akan menghasilkan luaran yang sangat baik pula. Semakin tinggi kegunaan lembaga tersebut ditengah masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadapnya (Arifin,

2011b: 242). Usaha dalam membangun karakter dan kepribadian akan melahirkan sebuah kredibilitas dan citra yang baik kepada publik. Hal ini kemudian menjadi dasar untuk peneliti dalam melihat KPU sebagai kelembagaan yang kuat dalam menciptakan citra dan meraup kepercayaan publik.

c. Menciptakan Kebersamaan

Langkah strategis selanjutnya yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan komunikasi politik adalah menciptakan kebersamaan antara komunikator politik (aktor ataupun lembaga politik) dengan meliputi empat aspek yaitu memahami khalayak, menyusun pesan persuasif, menetapkan metode, dan memilih media.

Memahami Khalayak, berkaitan dengan pentingnya mengenali keyakinan, kepentingan, dan motivasi khalayak untuk menciptakan dan menghasilkan sebuah strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Langkah ini dapat dilakukan dengan melalui observasi dan penelitian ilmiah.

Menyusun Persuasif, dalam menyusun pesan yang persuasif dibutuhkan beberapa hal ini, diantaranya adalah penentuan tema dan materi yang sesuai dengan kondisi dan situasi khalayak. Hal ini akan berimplikasi dalam membangkitkan partisipasi masyarakat melalui pesan-pesan politik yang disampaikan.

Menetapkan Metode, pemilihan terhadap metode dan media harus disesuaikan dengan bentuk pesan, keadaan khalayak, fasilitas, dan biaya. Metode-metode yang dapat digunakan dalam pengaplikasian komunikasi

politik adalah metode informatif, persuasif, edukatif, dan koersif. Semua metode ini masing-masing dapat digunakan secara bersama-sama untuk mengurangi kekurangan yang satu dan ditutupi oleh yang lain.

Memilah dan Memilih Media, pada dasarnya seluruh media dapat digunakan dikarenakan fungsinya yang berguna untuk membentuk dan membina pendapat umum, serta mempengaruhi pemberi suara dalam pemilihan umum. Mulai dari media yang dapat dilihat oleh mata seperti surat kabar, majalah poster, dan spanduk, serta media yang dapat didengar seperti radio, telepon, sirine, dan gendang. Pada akhirnya setiap penggunaan media bergantung pada kebutuhan atau kemampuan khalayak dalam menerima dan mencerna pesan-pesan politik yang akan disampaikan. Seleksi ini dimaksudkan agar pesan-pesan politik dapat tersampaikan dengan tepat sasaran.

d. Membangun Konsensus

Langkah strategis yang ketiga ini adalah sebuah upaya dalam membangun konsensus dengan memperhatikan dua hal penting yaitu sebagai berikut:

1. Seni berkompromi

Keberlangsungan forum atau rapat sering menimbulkan saling silang pendapat bahkan terjadinya konflik. Keadaan ini tentu harus diselesaikan dengan cara yang baik pula untuk menghasilkan pemahaman yang sama terkait keputusan yang diambil. Untuk menyelesaikan permasalahan ini diperlukan seni tersendiri yang disebut seni berkompromi. Seorang politikus atau pihak terkait harus selalu terbuka terhadap peluang-peluang

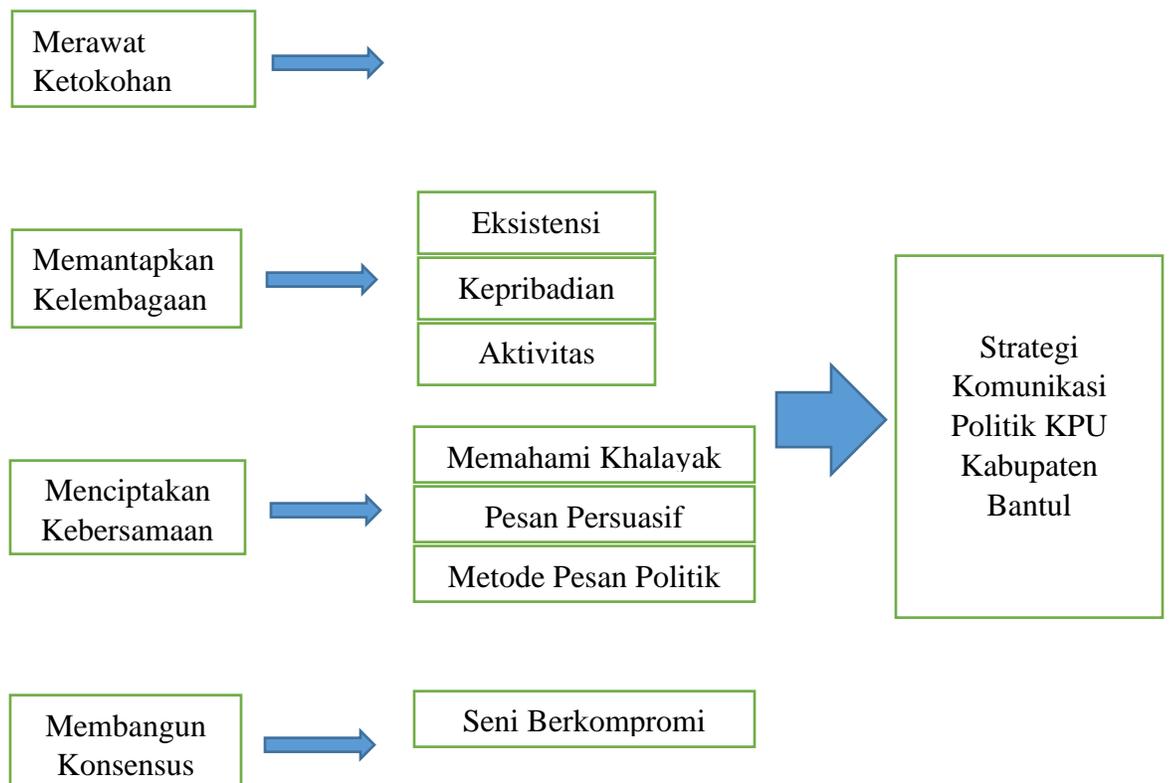
dalam proses lobi. Bakat ini dapat dilatih baik melalui pendidikan formal, informal, non formal, maupun pengalaman yang dibawa oleh seseorang sebelumnya.

2. Bersedia Membuka Diri

Sebelum melakukan lobi dalam rangka mencari solusi, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan dalam membuka diri masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan setiap individu yang terlibat dapat menerima pengalaman atau gagasan baru sesuai dengan konsep diri yang ada pada mereka yang berbeda pendapat.

Bagan 1.1

Strategi Komunikasi Politik KPU Kabupaten Bantul



Sumber: Hasil olahan peneliti

5. *Organizational Information theory*

Menurut Karl Wick teori informasi organisasi berkaitan dengan suatu cara pandang dalam menjelaskan pengelolaan informasi yang bersifat ambigu oleh organisasi. Fokus teori ini terdapat pada proses pengorganisasian anggota organisasi untuk mengelola informasi. Teori ini memiliki asumsi-asumsi dasar. Asumsi pertama didasarkan yang menyebutkan bahwa organisasi bergantung pada informasi yang bertujuan untuk mempertahankan dan mencapai tujuan organisasi. Asumsi kedua didasarkan pada perlunya memahami bahwa informasi yang diperoleh organisasi berada dalam ketidak jelasan. Hal ini menjadi dorongan untuk organisasi agar menempatkan sumber daya anggota yang kompeten dalam menerjemahkan ambiguitas yang ditemukan dalam informasi yang diperoleh. Asumsi ketiga bermaksud pada pentingnya sinergi antara internal organisasi dalam mengurangi ambiguitas yang diperoleh dari internal maupun eksternal. Tujuan dari sinergitas ini untuk menekan potensi informasi yang bersifat ambigu sebagai penghambat tujuan dari sebuah organisasi (West & Turner, 2009).

Asumsi pertama memberikan pemahaman kepada peneliti terkait cara-cara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam rangka pemenuhan terhadap informasi dari masyarakat Kabupaten Bantul. Melalui cara-cara seperti pemanfaatan media sosial, web, survei, wawancara, dan bentuk interaksi-interaksi lain yang berfungsi sebagai kanal yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat yang sebagai calon pemilih. Pemrosesan informasi dari eksternal

berguna untuk merancang strategi komunikasi politik yang efektif, mengingat masyarakat aktif dalam pemilu berperan penting dalam menentukan pesan yang akan disampaikan oleh KPU.

Asumsi kedua memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa pentingnya penempatan terhadap sumber daya yang kompeten di bidangnya bertujuan untuk mengurangi ambiguitas informasi. Berkaca dengan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul, maka proses alur informasi berawal dari tim survei yang bertugas untuk menggali dan mendapatkan informasi. Kemudian, diolah secara lebih lanjut oleh tim publikasi untuk disampaikan kepada masyarakat melalui media-media dari KPU Kabupaten Bantul untuk mencapai tujuan komunikasi dalam Pilbup.

Asumsi ketiga berkaitan dengan sinergitas yang harus senantiasa dilakukan dengan internal maupun eksternal dari organisasi. Sinergitas ini dilakukan dengan melibatkan sub-sub bagian yang terdapat di instansi bertujuan untuk menerjemahkan informasi yang didapatkan dari berbagai pihak. Keterhubungan antara satu sama lain akan membentuk pola kerja yang bermuara pada keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang dicanangkan oleh organisasi atau instansi.

Posisi teknologi informasi dalam organisasi masa kini pun memiliki peran sentral dalam penanggulangan terhadap hambatan-hambatan seperti batasan ruang dan waktu, serta lokasi fisik seorang individu. Pengaruh fasilitas mampu menerobos hierarki tradisional dan batas-batas departemen dengan mudah, mengganti proses-proses sebelumnya dengan menawarkan pola-pola baru serta mengubah organisasi

secara mendasar (Pace & Faules, 2018: 229). Pengoptimalan teknologi informasi ini akan dilihat melalui penggunaannya di dalam lembaga KPU Kabupaten Bantul sebagai salah satu aspek penting dalam mencapai tujuan komunikasi politik.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti akan melihat ketersesuaian asumsi tersebut dalam penerapannya di lembaga KPU Kabupaten Bantul. Sumbangsih teori ini di dalam penelitian akan dilihat melalui kohesivitasnya sebagai salah satu aspek penting di dalam strategi komunikasi politik KPU. Pengelolaan terhadap ambiguitas informasi di tengah pandemi menjadi hal baru yang menarik untuk dilihat. Selain itu, peran sinergitas yang dilakukan oleh KPU dalam merangkul lembaga lain untuk mendukung tujuannya di dalam pemilu.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif adalah suatu aktivitas yang memiliki lokasi dan menempatkan penelitiannya di dunia. Bentuk praktik-praktiknya berupaya dalam mengubah dunia menjadi serangkaian representasi, yang mencakupi berbagai catatan lapangan, wawancara, percakapan foto, rekaman, dan catatan pribadi. Penelitian ini juga mempelajari benda di lingkungan ilmiahnya dan berusaha untuk memaknai dan menafsirkan fenomena dalam sudut pandang makna-makna yang diberikan oleh masyarakat (Denzin et al., 2009: 3).

Penerapan penelitian kualitatif digunakan untuk menangkap dan menjelaskan teori yang bersifat parsial, serta mampu menangkap kompleksitas dari permasalahan

yang kita teliti (Creswell, 2015: 65). Menurut Creswell Proses penelitian kualitatif selalu melibatkan upaya-upaya seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, analisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, serta menafsirkan data (Creswell, 2016). Pendekatan kualitatif juga memberikan jalan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti munculnya pengalaman sosial sekaligus cara memperoleh maknanya. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 melalui hasil wawancara dan dokumentasi.

Studi Kasus merupakan strategi untuk menjelaskan pada pokok pertanyaan sebuah penelitian yang berkenaan dengan *how* atau *why*. Metode ini digunakan jika peneliti hanya sedikit memiliki peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan fokus penelitiannya pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2019: 1). Menurut Kriyantono metode riset penelitian ini menggunakan berbagai sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program organisasi atau peristiwa secara sistematis. Penelaahan terhadap sumber data berasal dari berbagai sumber data seperti wawancara mendalam, observasi partisipan, dokumentasi, hasil survei, rekaman, dan bukti fisik lainnya (Kriyantono, 2010: 65).

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Ketua, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Teknis dan Humas, dan Komisioner KPU Kabupaten Bantul.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Bantul dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilbup Kabupaten Bantul tahun 2020.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Sekretariat KPU Kabupaten Bantul yang berlokasi di Jalan KH Wachid Hasyim Bantul, Jetis, Palbapang, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55713.

5. Jenis Data

Penelitian ini bersumber data primer dan sekunder. Adapun penelitian primer menurut Sugiyono yaitu data yang berasal langsung dari sumbernya (Sugiyono, 2016: 225). Selain itu, menurut Silalahi sumber primer merupakan suatu objek atau dokumen material yang dikumpulkan dari situasi aktual dari peristiwa yang terjadi (Silalahi, 2012: 289). Oleh karena itu, pada penelitian ini yang menjadi sumber dari penelitian ini langsung peneliti dapatkan dari KPU Kabupaten Bantul dengan menggunakan metode wawancara dengan Ketua, Komisioner, Sekretaris, dan KPU Kabupaten Bantul.

Sedangkan data sekunder menurut Silalahi merupakan data yang didapat atau dikumpulkan melalui sumber tangan kedua. Sumber ini merupakan data pendukung untuk penelitian. Sumber data sekunder ini meliputi komentar, interpretasi, pembahasan tentang materi, dan dokumentasi (Silalahi, 2012: 291). Oleh karena itu,

data sekunder dari penelitian ini berasal dari dokumentasi yang berkaitan dengan berbagai materi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bantul.

6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Robert K. Yin pada penelitian studi kasus bukti atau sumber data bisa berasal dari enam sumber, yaitu dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, obeservasi partisipan, dan perangkat-perangkat fisik. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengumpulan data studi kasus. Prinsip-prinsip tersebut berkaitan dengan pengumpulan data dalam studi kasus. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu berbagai sumber bukti yang berarti bukti dari dua atau lebih sumber, tetapi harus tetap menyatu dengan serangkaian fakta atau temuan yang sama, kemudian data dasar yang berarti kumpulan formal bukti yang berlainan dari laporan akhir studi kasus bersangkutan, yang terakhir adalah serangkaian bukti yang berarti keterkaitan ekspilisit antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, data yang dikumpulkan, dan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik (Yin, 2019: 101).

Penggalian informasi dalam penelitian ini secara mendalam dilakukam dengan informan melalui topik pertanyaan yang sudah ditentukan. Penggalian informasi ini bertujuan untuk mengetahui perspektif responden mengenai pola yang ditanyakan. Teknik wawancara ini dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber secara tatap muka (*face to face*).

Narasumber dari penelitian ini adalah Ketua, Komisioner, Sekretaris, dan Kepala Sub Bidang Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Bantul. Penetapan terhadap informan ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat membantu

mempermudah proses pengambilan data. Pemilihan informan ini tentu juga mempertimbangkan posisi di dalam hierarkis KPU Kabupaten Bantul. Adapun alasan dan rincian dalam pemilihan informan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Ketua KPU Kabupaten Bantul merupakan pemegang keputusan tertinggi di KPU Kabupaten Bantul. Kepemimpinan sebagai ketua akan dilihat melalui pendelegasian wewenang dan komitmen dalam menegakkan prinsip KPU sebagai penyelenggara pemilu kepada seluruh sumber daya di dalamnya. Selain itu, posisi beliau sebagai Ketua tentu sangat memahami setiap keputusan dalam menyusun strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Bantul.
- b. Komisioner divisi partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia merupakan penanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui strategi sosialisasi dan penggunaan media oleh KPU Kabupaten Bantul. Beliau tentu sangat memahami dan mengetahui setiap latar belakang pengambilan keputusan di dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Cara-cara dan metode yang digunakan oleh KPU dalam melaksanakan sosialisasi.
- c. Sekretaris merupakan penanggung jawab dalam sekretariat KPU Kabupaten Bantul yang bertugas untuk mengkoordinasikan segala bentuk keputusan yang sudah diambil dan mengadakan bimbingan kepada sub bagian yang ada di Sekretariat. Oleh karena itu, pemahaman beliau, kemampuan berkomunikasi, serta program yang dibuat untuk meningkatkan kinerja staf di Sekretariat. Hal ini tentu akan berimplikasi

pada koordinasi dan capaian yang didapatkan oleh KPU Kabupaten Bantul selama menjadi penyelenggara pemilu.

- d. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan teknis sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Pada penelitian ini keterlibatan beliau dalam teknis pelaksanaan sosialisasi, penyampaian informasi, penggunaan media, serta kebutuhan masyarakat akan dokumentasi dan informasi mengenai kepemiluan tentu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tabel 1.2 Informan Penelitian

No	Informan	Nama
1.	Ketua KPU Kabupaten Bantul	Didik Joko Nugroho, S.ant
2.	Komisioner Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Musnif Istiqomah, S.Pd.I
3.	Sekretaris KPU Kabupaten Bantul	Yayulianto, SE
4.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat	Rahmat Purwono, S.IP., MA

Adapun pengumpulan data sekunder dari penelitian ini, penulis kumpulkan dari buku-buku, arsip, artikel, surat, berita, maupun naskah yang sesuai untuk

mendukung penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini akan menggunakan teknis penjadohan pola. Menurut Robert K. Yin logika penjadohan pola dilakukan dengan cara membandingkan pola yang sudah diprediksi atau dengan prediksi alternatif. Jika kedua pola ini memiliki persamaan, maka hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan (Yin, 2019: 140).

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti akan menggunakan penjadohan pola dengan sebelumnya melakukan prediksi atas pola yang berkaitan dengan strategi komunikasi politik KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Bantul tahun 2020. Pola prediksi yang dimaksud adalah aspek keseluruhan dari teori strategi komunikasi politik yang digagas oleh Anwar Arifin yaitu merawat ketokohan, memantapkan kelembagaan, menciptakan kebersamaan, dan membangun konsensus. Kemudian pola ini akan dilihat penerapannya dalam KPU Kabupaten Bantul. Implikasi dari penjadohan pola ini adalah untuk menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan. Hal ini diakibatkan adanya kesesuaian antara nilai empiris dengan tujuan yang diharapkan.

8. Uji Validitas Data

Menurut Sutopo uji validitas merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil dari penelitian (Sutopo, H. ., 2002: 78). Uji validitas metode dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data. Triangulasi pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan terhadap triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2008: 273).

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan cara pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan pengecekan terhadap data yang diperoleh dari sumber utama. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis dan disimpulkan, serta melakukan pengecekan terhadap sumber data yang lain dengan melihat kesesuaiannya dengan sumber data utama.

b. Triangulasi Teknik

Merupakan cara pengujian kredibilitas data dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Sebagai contoh melakukan pengecekan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika data yang dihasilkan berbeda dengan teknik yang berbeda tersebut, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

c. Triangulasi Waktu

Proses pengumpulan data harus memperhatikan ketepatan situasi dan kondisi. Sebagai contoh data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada waktu pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Jika data hasil uji yang didapat berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang hingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2008: 273).

Peneliti mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dengan dua komisioner KPU Kabupaten Bantul, Sekretaris, serta Kepala Sub Bagian Hupmas. Setelah itu penulis akan melakukan uji validasi dengan studi dokumen

yang berkaitan dengan hasil penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2020.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Pada bab pendahuluan yang disajikan dalam penelitian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum atau profil dari objek penelitian yaitu KPU Kabupaten Bantul.

BAB III: Pembahasan

Bab pembahasan akan memuat pemaparan penjelasan mengenai sajian data, analisis, dan koleksi data yang telah dikumpulkan berdasarkan metode penelitian yang telah ditetapkan yaitu wawancara dan studi dokumen dari objek penelitian. Bab ini akan menjelaskan mengenai strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Bantul dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Hal ini akan dikemas dalam sajian dan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen.

BAB IV: Penutup

Pada bab ini akan berisi pembahasan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di KPU Kabupaten Bantul mengenai strategi komunikasi politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati tahun 2020 secara ringkas dan menyeluruh. Peneliti juga akan menyajikan saran terkait hasil temuan pada bagian ini.